

TUNTUT PEMBERIAN THR HINGGA STATUS

Puluhan Karyawan Rumah Pemotongan Ayam Demo

SLEMAN (KR) - Puluhan buruh pabrik Group Rumah Pemotongan Ayam (RPA) di kawasan Jalan Gito Gati berunjukrasa, Senin (13/7). Dua tuntutan para pendemo yakni terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak hingga buruh yang tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut perwakilan Serikat Buruh Peternakan (SBS) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Erlangga, aksi ini disebabkan tindakan perusahaan yang menghentikan buruh secara sepihak. Mereka juga menuntut perusahaan untuk mempertahankan para buruh yang sempat dirumahkan saat pandemi Covid-19. "Kawan-kawan buruh yang dirumahkan dan dipanggil kembali bekerja,

sampai hari ini mereka ditetapkan statusnya sebagai buruh harian lepas. Kami menuntut agar perusahaan memperlakukan karyawan dipanggil bekerja kembali," tegasnya. Erlangga mengungkapkan, pihak perusahaan melakukan efisiensi dengan memutuskan hubungan kerja karena selama pandemi Covid-19 mengalami kerugian. Namun perusahaan berdalih jika kondisi rugi

ini sudah terjadi dua tahun belakangan ini. Total buruh yang di-PHK dari dua perusahaan PT Saliman Riyanto Raharjo (PT SRR) dan CV Mitra Gema Lestari (CV MGL) sekitar 100 orang. "Seluruh buruh yang dirumahkan merupakan buruh yang akhirnya di-PHK. Mereka hanya menerima tali kasih yang sebesar satu kali gaji. Perusahaan juga tidak memberikan THR padahal buruh yang dirumahkan dilakukan periode 1 Mei dan tanggal 6 Mei. Ini artinya mereka masih berhak atas THR tapi sampai saat ini perusahaan belum memberikannya. Hasil negosiasi, perusahaan baru bisa memenuhi satu tuntutan

kami, yakni tentang pembayaran kawan-kawan yang di-PHK. Jika belum terpenuhi, kami akan maju ke Tripartit dengan melibatkan pihak pemerintah antara permasalahan buruh dan perusahaan," papar Erlangga. Sementara itu Finance Accounting PT SSR Junaedi menerangkan, pihaknya dengan para buruh akan bertemu lagi 20 Juli mendatang. "Tuntutan yang disampaikan belum konkret data-datanya. Sehingga kami meminta dikirim email paling lambat hari Jumat (17/7). Hari Senin (20/7) kami akan bertemu lagi untuk membahas data itu," imbuh Junaedi. Camat Sleman Mustadi



KR-Mahar Prastiwi

Sejumlah buruh melakukan aksi demonstrasi terkait pemutusan hubungan kerja dan THR yang tidak diberikan kepada buruh.

menyatakan, di wilayah Sleman ada beberapa perusahaan besar dengan jumlah buruh ribuan. Saat ini permasalahan internal jadi kami hanya memantau," katanya. (Aha)-d

BWI Diminta Gencarkan Sosialisasi Wakaf

SLEMAN (KR) - Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Sleman masa bakti 2019-2022 dilantik, Senin (13/7) siang di Kantor Kementerian Agama Sleman. Diharapkan para pengurus BWI untuk gencar mensosialisasikan tentang wakaf di masyarakat. Ketua BWI DIY H Fahmy Akbar Idries mengatakan, wakaf ini belum dikenal seperti zakat dan infak oleh masyarakat. Untuk itu, pengurus perwakilan BWI Sleman perlu menggencarkan literasi wakaf ke masyarakat. "Masyarakat lebih kenal dengan zakat dan infak. Sedangkan wakaf ini belum begitu dikenal oleh masyarakat. Makanya kami minta pengurus terus mensosialisasikannya," kata Fahmy. Menurutnya, wakaf itu tidak hanya berbentuk tanah saja.



KR-Saifulah Nur Ichwan

Fahmy saat melantik pengurus BWI Sleman.

Namun masyarakat dapat ditunjuk untuk mengelola. Tapi untuk uang, harus diserahkan ke lembaga yang telah mendapat izin. Sedangkan pengurus BWI ini tugasnya membina, mengawasi dan mengurus jika ada yang bermasalah," ujarnya. (Sni)-d

Kerusakan Cukup Parah Komisi A Minta Jalur Evakuasi Diperbaiki

SLEMAN (KR) - Kondisi jalur evakuasi di wilayah Glagaharjo Cangkringan ada yang rusak parah. Komisi A DPRD Kabupaten Sleman meminta kepada eksekutif untuk segera memperbaiki jalur evakuasi di lereng Merapi supaya tidak ada kendala jika sewaktu-waktu digunakan. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST mengatakan, Gunung Merapi saat ini terjadi penggelembungan, meskipun relatif kecil. Dengan adanya itu, dewan kemarin telah melakukan monitoring di Pos Pakem dan dilanjutkan ke kawasan lereng Merapi. "Monitoring itu untuk meli-

hat kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat jika nanti sewaktu-waktu ada peningkatan status Gunung. Tadi kami mengecek semua sarana dan prasarannya," katanya di Sleman, Senin (13/7). Dalam monitoring kemarin, Komisi A mendapati kondisi jalur evakuasi yang rusak cukup parah di wilayah Glagaharjo Cangkringan sepanjang 2 km. Tentunya kondisi itu akan mengganggu jika sewaktu-waktu digunakan untuk evakuasi warga. "Jalannya berlubang dan berdebu. Ini sangat tidak layak jika digunakan jalur evakuasi. Untuk itu kami

minta kepada eksekutif memperbaiki jalur evakuasi. Bahkan kami minta anggarannya dimasukkan dalam APBD perubahan," tuturnya. Di samping sarana dan prasarana, Komisi A juga mengecek kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana Gunung Merapi. Masyarakat telah siap dengan tas minggatnya untuk evakuasi beserta barang-barang berharga. "Masyarakat menamakan tas minggat. Tas itu berisi barang-barang berharga. Jika sewaktu-waktu terjadi bencana, masyarakat sudah siap dievakuasi dengan membawa tas minggatnya," katanya. (Sni)-d

PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Guru Diharapkan Mengecek Aktivitas Siswa

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman Sri Purnomo meminta para guru bukan hanya memberikan tugas semata. Namun para guru harus bisa memastikan komunikasi pembelajaran secara dua arah berjalan dengan baik. "Ya, memang sekarang ini pembelajaran secara daring. Makanya kami minta komunikasi dua arah harus berjalan baik. Jangan hanya memberikan tugas," kata Bupati di kantornya, Senin (13/7), terkait dimulainya pembelajaran jarak jauh. Bupati juga meminta para guru untuk mengecek sistem pembelajaran secara daring berjalan dengan baik atau tidak. Bahkan jika memungkinkan, guru mengunjungi rumah siswa. "Jangan sampai nanti siswa itu hanya bermain saja. Makanya guru bisa mengecek ke rumah siswa," ujarnya. Sementara Kepala SMPN 2 Pakem Triworo mengatakan, di tahun ajaran baru ini pihaknya juga akan melakukan pen-

dataan jumlah siswa yang tidak punya handphone untuk pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Karena selama ini banyak siswa yang tidak punya handphone sendiri dan masalah jaringan internet. "Kami akan mendata siswa yang jaringan internetnya tidak bagus dan tidak punya handphone untuk mengikuti PJJ. Program dari dinas yakni social gadget, jika ada yang punya lebih bisa diberikan ke sekolah dan digunakan anak-anak yang tidak punya handphone," bebernya. Dengan pendataan ini, lanjut Triworo, sekolah bisa memberikan solusi bagi siswa agar tetap bisa mengerjakan tugas di rumah. Tapi pihak sekolah juga memberikan fasilitas luar jaringan (luring) bagi siswa yang benar-benar tidak bisa mengakses tugas secara daring. "Minimal melalui Whatsapp dikirim ke orangtua. Jika tidak punya handphone, orangtua mengambil tugas ke sekolah," bebernya. (Sni/Aha)-d

WAJIB BAWA HASIL RAPID TEST

Pemkab Kembali Terima Kunjungan Kerja



KR-Istimewa

Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan saat diterima di Pemkab Sleman.

SLEMAN (KR) - Mulai Senin (13/7) hari ini, Pemkab Sleman kembali menerima kunjungan kerja dari pemerintah daerah luar DIY. Sebelumnya, Pemkab Sleman tidak menerima kunjungan kerja dari luar daerah mulai 1 Mei untuk menekan penyebaran Covid-19. Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan menjadi tamu pertama yang berkunjung di Kabupaten Sleman terkait studi banding pengelolaan pasar. Kunker tersebut diterima langsung oleh Asisten

Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suyono di Ruang Rapat Disperindag Kabupaten Sleman. Kunker tersebut menerapkan kebiasaan baru seperti tempat duduk yang diberi jarak serta wajib menggunakan masker ketika di dalam ruangan. Selain itu, seluruh rombongan DPRD Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari 11 orang diwajibkan membawa keterangan Rapid Test dengan ketelanjangan nonreaktif dari tempat asal sebagai salah satu persyaratan

memasuki DIY. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengatakan, kunker tersebut terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional. Hal tersebut tentu dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. "Pasar di Kabupaten Sleman jauh lebih berkembang dan terlihat lebih nyaman dan tertata. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk berbelanja di pasar tradisional," ujarnya. Sementara Asekda Suyono mengatakan, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, Pemkab Sleman telah merenovasi beberapa pasar tradisional menjadi tempat yang nyaman layaknya pasar modern yang bersih dan tertata. "Salah satunya yang sudah kami renovasi yakni Pasar Prambanan, Pasar Sleman, hal tersebut meningkatkan kunjungan pasar tradisional," katanya. (Has)-d

krjogja.com
Lebih Mengerti Jogja

Hosting
BEST
Design

dari
JOGJA
untuk
DUNIA

Redaksi:
Jl. Margo Utomo /
Jl. P. Mangkubumi 40-46
Yogyakarta 55232
redaksi@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 121)

Iklan :
iklan@krjogja.com
Telp : +62-274 565 685
(ext- 129)

www.krjogja.com